



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB.1/MENHUT-II/2013
NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
5. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian ekosistem hutan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

10. Kegiatan ...

10. Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah segala aktivitas pengendalian ekosistem hutan yang meliputi pendidikan, penyiapan pengendalian ekosistem hutan, pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
14. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
15. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

Bagian Ketiga

Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang
Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi:
 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 3. Melakukan ...

3. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
4. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
5. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
6. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
7. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
8. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian bibit;
9. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
10. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
11. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian tenaga teknis PHPL;
12. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
13. Melakukan entry data penilaian penatausahaan hasil hutan;
14. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam;
15. Merintis dan memasang patok batas;
16. Membersihkan dan menyiapkan lahan;
17. Menanam bibit;
18. Melakukan sortasi penanganan buah dan benih;
19. Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan;
20. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
21. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
22. Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
23. Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran;
24. Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti;
25. Melakukan digitasi peta;
26. Melakukan entry data non spasial;
27. Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi;
28. Scanning peta;
29. Membuat leaflet;
30. Membuat poster/banner/baliho;
31. Membuat buletin;
32. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
33. Melakukan pameran/display;
34. Membuat papan informasi;
35. Membuat buklet;
36. Membuat audio visual;
37. Membuat sinopsis;
38. Membuat slide;
39. Melaksanakan pameran;
40. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
41. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
42. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
43. Melakukan studi banding;
44. Melakukan kunjungan kerja;
45. Melakukan ...

45. Melakukan magang;
 46. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota; dan
 47. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi;
 10. Melakukan orientasi citra dan pengenalan data;
 11. Menyajikan peta skala besar;
 12. Menyajikan peta skala sedang;
 13. Menyajikan peta skala kecil;
 14. Memancang batas sementara;
 15. Mengumumkan pemancangan batas sementara;
 16. Memancang batas definitif;
 17. Membuat laporan hasil pembahasan;
 18. Membuat Berita Acara Penataan Batas;
 19. Pengambilan titik koordinat;
 20. Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan;
 21. Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta;
 22. Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok;
 23. Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan;
 24. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
 25. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian benih;
 26. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
 27. Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
 28. Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL;
 29. Memeriksa kelayakan fungsi sarana penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 30. Menelaah administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan;
 31. Melaksanakan pengambilan sampel benih sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 32. Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 33. Melaksanakan pengambilan sampel bibit;
 34. Melaksanakan pengamatan sampel ulat;
 35. Mengidentifikasi calon sertifikasi tenaga teknis PHPL;
 36. Mendata hasil penangkaran/budidaya;
 37. Melaksanakan tagging;
 38. Menyiapkan ...

38. Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
39. Melaksanakan pelayanan wisata alam;
40. Memungut iuran PNBP;
41. Mengukur batas lokasi dan jalur;
42. Menanam bibit;
43. Mengunduh buah;
44. Melakukan ekstraksi;
45. Melakukan pengeringan;
46. Melakukan penyimpanan;
47. Melaksanakan hakitate;
48. Melaksanakan pengambilan sampel;
49. Membuat herbarium/spesimen satwa;
50. Memelihara herbarium/spesimen satwa;
51. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN);
52. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
53. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
54. Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa;
55. Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;
56. Melakukan transplantasi terumbu karang;
57. Melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan;
58. Pengamatan permanent/temporary sample plot;
59. Melaksanakan rehabilitasi satwa;
60. Melakukan pengukuran TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
61. Menyelenggarakan lomba cinta alam;
62. Mengentry data;
63. Membuat leaflet;
64. Membuat poster/banner/baliho;
65. Membuat buletin;
66. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
67. Melakukan pameran/display;
68. Membuat papan informasi;
69. Membuat buklet;
70. Membuat audio visual;
71. Membuat sinopsis;
72. Membuat slide;
73. Melaksanakan pameran;
74. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
75. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
76. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
77. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
78. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
79. Mengembangkan ...

79. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 80. Melakukan studi banding;
 81. Melakukan kunjungan kerja;
 82. Melakukan magang;
 83. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 84. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 85. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 86. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Menyiapkan sarana prasarana inventarisasi terestris;
 4. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 10. Melakukan pengukuran titik GPS;
 11. Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS;
 12. Membuat peta hasil pengolahan GPS;
 13. Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;
 14. Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan;
 15. Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan;
 16. Melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 17. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit;
 18. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
 19. Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 20. Memeriksa lapangan penilaian penatausahaan hasil hutan;
 21. Mengidentifikasi calon sumber benih;
 22. Melaksanakan pengujian kemurnian benih;
 23. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir;
 24. melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit;
 25. Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL;
 26. Melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
 27. Melakukan wisata pendidikan;
 28. Mempersiapkan bibit;
 29. Memelihara bibit;
 30. Melakukan pengepakan;
 31. Melaksanakan tabulasi data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
 32. Mengambil data perkembangan bibit induk;
 33. Memelihara ...

33. Memelihara kebun bibit murbei;
34. Melaksanakan pengendalian hama;
35. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan;
36. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN);
37. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
38. Menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
39. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
40. Menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
41. Melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan;
42. Melakukan penjarangan populasi satwa;
43. Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan;
44. Penetapan permanent/temporary sample plot;
45. Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
46. Melaksanakan pelepas liaran satwa;
47. Melaksanakan pendampingan kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter);
48. Melaksanakan kemah konservasi;
49. Membuat komposisi peta hasil digitasi;
50. Menyusun dan melakukan pengelolaan library;
51. Menyiapkan bahan Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
52. Menjadi saksi ahli Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
53. Membuat leaflet;
54. Membuat poster/banner/baliho;
55. Membuat buletin;
56. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
57. Melakukan pameran/display;
58. Membuat papan informasi;
59. Membuat buklet;
60. Membuat audio visual;
61. Membuat sinopsis
62. Membuat slide;
63. Melaksanakan pameran;
64. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
65. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
66. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
67. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
68. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;

69. Mengembangkan ...

69. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 70. Melakukan studi banding;
 71. Melakukan kunjungan kerja;
 72. Melakukan magang;
 73. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 74. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 75. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 76. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Membuat proyeksi titik ukur;
 10. Mengelola data base tata batas;
 11. Memberi saran tindak lanjut terhadap penilaian rencana pengelolaan hutan;
 12. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 13. Memberi saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL;
 14. Merumuskan saran dan tindak lanjut penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 15. Melakukan cross check dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan;
 16. Memberi saran dan tindak lanjut terhadap penilaian penatausahaan hasil hutan;
 17. Mendiskripsikan calon sumber benih;
 18. Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pra sertifikasi tenaga teknis PHPL;
 19. Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 20. Mengamati bunga dan buah dalam rangka eksplorasi benih;
 21. Mengumpulkan data primer pada persiapan pengelolaan persuteraan alam;
 22. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
 23. Menelaah hasil pelaksanaan gladi/simulasi/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 24. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
 25. Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
 26. Melaksanakan pengembangan habitat dan satwa liar;
 27. Melakukan pengembangan permanent/temporary sample plot;

28. Menyusun ...

28. Menyusun naskah bahan kemitraan;
 29. Mencatat hasil dan manfaat dampak pada pembinaan areal model;
 30. Mengelola atau membimbing camping ground;
 31. Menyajikan data sistem informasi manajemen;
 32. Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan;
 33. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG;
 34. Menjadi saksi ahli dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
 35. Membuat leaflet;
 36. Membuat poster/banner/baliho;
 37. Membuat buletin;
 38. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
 39. Melakukan pameran/display;
 40. Membuat papan informasi;
 41. Membuat buklet;
 42. Membuat audio visual;
 43. Membuat sinopsis;
 44. Membuat slide;
 45. Melaksanakan pameran;
 46. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 47. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 48. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 49. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 50. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 51. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 52. Melakukan studi banding;
 53. Melakukan kunjungan kerja;
 54. Melakukan magang;
 55. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 56. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 57. Melakukan monitoring pelanggaran dan peneraan sanksi sebagai anggota; dan
 58. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi:
 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan Identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan ...

3. Melakukan inventarisasi flora sebagai ketua;
4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua;
5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai ketua;
6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai ketua;
7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi sebagai anggota;
9. Mengolah data GPS termasuk unduh data;
10. Menganalisis hasil pengolahan data GPS;
11. Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan;
12. Mengumpulkan referensi;
13. Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;
14. Menguji hasil penafsiran di lapangan;
15. Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
16. Menyajikan hasil penafsiran digital;
17. Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi;
18. Menghitung neraca sumber daya hutan;
19. Membahas trayek batas;
20. Pengecekan pal batas;
21. Melakukan uji petik tata batas di lapangan;
22. Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok;
23. Menelaah peta dan data terkait;
24. Melakukan evaluasi lapangan;
25. Melakukan skoring;
26. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan;
27. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri;
28. Mengentry data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
29. Menganalisis data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
30. Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
31. Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
32. Menganalisis data pengujian dan penilaian benih;
33. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian bibit;
34. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
35. Melaksanakan kegiatan pengujian mutu sutra alam;
36. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
37. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
38. Melakukan entry data penilaian dokumen iuran kehutanan;
39. Menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
40. Menelaah administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
41. Melaksanakan pemeriksaan administrasi penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
42. Melaksanakan ...

42. Melaksanakan pengambilan sample;
43. Menganalisis data;
44. Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih;
45. Melaksanakan pengujian kadar air benih;
46. Melaksanakan pengujian daya kecambah benih;
47. Menganalisis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit;
48. Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1;
49. Mengolah dan menganalisa;
50. Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya;
51. Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan;
52. Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung;
53. Mengumpulkan data dan peta;
54. Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL;
55. Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
56. Membangun sumber benih/demplot/arboretum/ASDG;
57. Membuat peta dan layout penanaman;
58. Memelihara bibit;
59. Menyusun instrumen;
60. Menyiapkan kebutuhan personil;
61. Melaksanakan pengujian sampel;
62. Inventarisasi potensi;
63. Membuat peta potensi;
64. Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan;
65. Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri;
66. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
67. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
68. Mengkaji tingkah laku/watak api;
69. Mengembangkan teknik evaluasi;
70. Menganalisis dampak kebakaran hutan;
71. Mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban;
72. Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli;
73. Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa;
74. Melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi;
75. Melaksanakan demplot penangkaran;
76. Pengolahan data dan analisa permanent/temporary sample plot;
77. Menangani konflik satwa liar;
78. Mengembangkan konsep pelepas liaran satwa;
79. Melakukan analisa data TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
80. Menyusun instrumen;
81. Mengumpulkan data primer;
82. Melakukan bimbingan teknis;
83. Menentukan tujuan;
84. Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil;
85. Merekrut kader;
86. Mengumpulkan data dan informasi;
87. Mempersiapkan kelompok sasaran;
88. Mempersiapkan lokasi;
89. Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model;

90. Mengolah ...

90. Mengolah data/up dating data;
 91. Melakukan back up data rutin;
 92. Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG;
 93. Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi;
 94. Menjadi saksi ahli;
 95. Membuat leaflet;
 96. Membuat poster/banner/baliho;
 97. Membuat buletin;
 98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
 99. Melakukan pameran/display;
 100. Membuat papan informasi;
 101. Membuat buklet;
 102. Membuat audio visual;
 103. Membuat sinopsis;
 104. Membuat slide;
 105. Menyusun konsep informasi teknis;
 106. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi;
 107. Melaksanakan pameran;
 108. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 109. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 110. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 111. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 112. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 113. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 114. Melakukan studi banding;
 115. Melakukan kunjungan kerja;
 116. Melakukan magang;
 117. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota.
 118. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 119. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 120. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 4. Melakukan re-enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;

5. Menyusun ...

5. Menyusun rancangan inventarisasi non terestris;
6. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol GPS;
7. Membuat mozaik citra secara digital;
8. Menyusun kunci penafsiran;
9. Pemutakhiran data kawasan hutan;
10. Membahas hasil penataan batas definitif;
11. Melakukan penilaian tata batas;
12. Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
13. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan;
14. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja;
15. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan;
16. Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE;
17. Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan;
18. Memeriksa administrasi penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
19. Melakukan penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
20. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
21. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian benih;
22. Menganalisis data pengujian dan penilaian bibit;
23. Melakukan pengamatan sampel mutu persuteraan alam;
24. Memberikan rekomendasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutra;
25. Menganalisis data penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
26. Melakukan penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
27. Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
28. Melakukan cross check dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
29. Memeriksa lapangan kegiatan industri hasil hutan;
30. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
31. Melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
32. Melakukan pengujian sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
33. Melakukan penilaian sertifikasi jasa lingkungan;
34. Menganalisis calon sumber benih;
35. Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz);
36. Melaksanakan pengujian cutting test;
37. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit dalam rangka sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;

38. Melaksanakan ...

38. Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1;
39. Merumuskan saran dan tindak lanjut sertifikasi tenaga teknis PHPL;
40. Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
41. Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/ pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
42. Menganalisis pemasaran hasil hutan;
43. Mengolah dan menganalisa data dalam pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL/fasilitas pelaksanaan kegiatan HTR;
44. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
45. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari;
46. Membuat rancangan penanaman dalam rangka membangun sumber benih/demplot/arboretum/ASDG;
47. Membuat persemaian;
48. Melakukan pengolahan/analisa data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
49. Melaksanakan sertifikasi bebas *pebrine*;
50. Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera;
51. Menganalisis potensi dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
52. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
53. Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran;
54. Mengkaji potensi perburuan satwa;
55. Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa;
56. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
57. Mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
58. Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
59. Mengkaji prosedur *Search And Rescue* regu kebakaran;
60. Melakukan kajian daya dukung kawasan;
61. Melaksanakan tindakan medis terhadap satwa;
62. Menilai kesehatan/perilaku satwa;
63. Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
64. Mengembangkan rehabilitasi satwa;
65. Mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
66. Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa;
67. Melakukan penyusunan rekomendasi pengelolaan DAS dan tata air;
68. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
69. Menyajikan diagram dan tabel (data);
70. Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat;
71. Melakukan pendampingan dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
72. Melakukan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;

73. Mengkaji ...

73. Mengkaji pengembangan kelembagaan masyarakat;
74. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat;
75. Mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum *interpreter*, *guide* dan *porter*);
76. Mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
77. Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan;
78. Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja;
79. Menganalisa usaha RHL;
80. Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan;
81. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
82. Menyusun naskah laporan areal model;
83. Menyusun pola pembinaan areal model;
84. Melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan areal model;
85. Menganalisa data sistem informasi manajemen;
86. Mengembangkan data base non spatial;
87. Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW);
88. Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet;
89. Melakukan analisa data SIG;
90. Menyusun sistem/model/program;
91. Menguji dan memvalidasi sistem/model/program;
92. Menyusun manual;
93. Melakukan konsultasi pengendalian ekosistem hutan;
94. Menjadi saksi ahli pengendalian ekosistem hutan;
95. Membuat *leaflet*;
96. Membuat poster/*banner*/baliho;
97. Membuat buletin;
98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
99. Melakukan pameran/*display*;
100. Membuat papan informasi;
101. Membuat buklet;
102. Membuat *audio visual*;
103. Membuat sinopsis;
104. Membuat *slide*;
105. Melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
106. Melakukan sosialisasi/diseminasi;
107. Melaksanakan pameran dalam rangka sosialisasi/diseminasi;
108. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
109. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
110. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
111. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
112. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
113. Mengembangkan ...

113. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
114. Melakukan studi banding;
115. Melakukan kunjungan kerja;
116. Melakukan magang;
117. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
118. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
119. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
120. Melakukan evaluasi sebagai anggota.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua;
2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai ketua;
3. Menyusun rancangan inventarisasi;
4. Menganalisa hasil penafsiran citra satelit;
5. Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi;
6. Menghitung potensi sumber daya hutan;
7. Rekalkulasi batas kawasan hutan;
8. Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
9. Melaksanakan *review* zonasi;
10. Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi;
11. Verifikasi PNBPN (Penghasilan Negara Bukan Pajak);
12. Membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan/perubahan fungsi/penunjukan/penggunaan/pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan;
13. Melakukan identifikasi penggunaan pola ruang;
14. Verifikasi usul perubahan;
15. Membuat kajian lingkungan hidup strategis;
16. Menyusun kriteria/indikator kegiatan;
17. Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang;
18. Membuat laporan Perubahan peruntukan;
19. Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
20. Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
21. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
22. Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan;
23. Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
24. Membuat model unit pengelolaan hutan;
25. Melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
26. Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil *review* tata ruang wilayah propinsi;
27. Melakukan ...

27. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan;
28. Memverifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa;
29. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
30. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan;
31. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
32. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
33. Melakukan pengkajian usulan ijin industri hasil hutan;
34. Melakukan penelaahan ijin industri hasil hutan;
35. Memberikan saran tindak lanjut Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
36. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih;
37. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit;
38. Saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
39. Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan / pembinaan hutan);
40. Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan;
41. Mengolah dan menganalisa penilaian dokumen iuran kehutanan;
42. Mengola dan menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan;
43. Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan;
44. Memberikan saran tindak lanjut penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
45. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
46. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi jasa lingkungan;
47. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
48. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
49. Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan;
50. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
51. Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
52. Merumuskan saran tindak lanjut URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
53. Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
54. Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
55. Pengembangan teknologi perbenihan;
56. Menganalisis data perkembangan bibit induk;
57. Rekomendasi pengembangan;
58. *Ekspose* penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
59. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
60. Mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut, serasah dll);
61. Mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi;
62. Mengembangkan ...

62. Mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
63. Memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa;
64. Menyajikan hasil identifikasi masalah;
65. Melakukan Sosialisasi;
66. Melakukan Advokasi;
67. Menganalisis masalah;
68. Merumuskan struktur kelembagaan;
69. Merumuskan tata hubungan kerja;
70. Merumuskan prosedur kerja;
71. Merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan;
72. Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan;
73. Merumuskan konsep kerjasama Pelaku Usaha Sektor Kehutanan;
74. Mempresentasikan hasil areal model;
75. Menyusun rancangan sistem data-base;
76. Mengembangkan sistem informasi;
77. Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG;
78. Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif);
79. Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
80. Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
81. Menjadi saksi ahli dalam pengendalian ekosistem hutan;
82. Membuat *leaflet*;
83. Membuat poster/*banner*/baliho;
84. Membuat buletin;
85. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
86. Melakukan pameran/*display*;
87. Membuat papan informasi;
88. Membuat buklet;
89. Membuat *audio visual*;
90. Membuat sinopsis;
91. Membuat *slide*;
92. Melaksanakan pameran;
93. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
94. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
95. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
96. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
97. Melakukan studi banding;
98. Melakukan kunjungan kerja;
99. Melakukan magang;
100. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
101. Melakukan monitoring pelanggaran dan peneraan sanksi sebagai ketua; dan
102. Melakukan evaluasi sebagai ketua.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai dengan jenjang jabatannya karena formasi kosong atau beban tugas tidak sesuai dengan jumlah Pengendali Ekosistem Hutan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Ekosistem Hutan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)Pegawai ...

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dari Jabatan Lain

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), atau ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3)Jumlah ...

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengendalian ekosistem hutan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat
Perpindahan dari Terampil ke Ahli
Pasal 12

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan diangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan diangkat ke dalam Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

(5) Kenaikan ...

- (5) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
- Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - Fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

- Bahan penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- Usul penetapan angka kredit untuk:
 - Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan harus dilampiri dengan:
 - surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

c.surat ...

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pengendali ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Penyiapan pengendalian ekosistem hutan, penyusunan rencana kerja PEH.
 - c. Pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
 - 1. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan;
 - 2. Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
 - 3. Pemanfaatan sumber daya hutan;
 - 4. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan;
 - 5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 6. Sistem informasi pengendalian ekosistem hutan;
 - 7. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 8. Sosialisasi/diseminasi.

d.Pengembangan ...

- d. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - 1. Penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan;
 - 2. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan;
 - 3. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan;
 - 4. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan;
 - 5. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - 6. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 7. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
 - 1. Memantau; dan
 - 2. Evaluasi.
 - f. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- (3) Unsur Penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
- a. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi:
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan

2. Pengendali ...

2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
 - c. Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
 - (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b.Tim ...

- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan;
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Apabila Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan lain yang terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
 - c. Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, unsur kepegawaian, dan Pengendali Ekosistem Hutan.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk :
 - a. Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Direktorat Jenderal/Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota harus berasal dari unsur kepegawaian Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk :
 - a. Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengendali Ekosistem Hutan.
 - b. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengendali Ekosistem Hutan dan 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk penilaian prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (10) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 22

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat:

- a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan:

- a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan dalam menetapkan angka kredit bagi :
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan:

- a. membantu Kepala UPT yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi:

- a. membantu Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5)Tugas ...

(5) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:

- a. membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan, yaitu:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendali ekosistem hutan, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Pejabat ...

- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian paling rendah eselon III Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk angka kredit:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan
 - 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
- c. Pejabat yang membidangi Kepegawaian paling rendah eselon IV di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan kepada Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengendali Ekosistem Hutan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Muda, sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan masing-masing.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Muda yang akan naik jabatan menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pendidikan dan pelatihan pejenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan ...

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
- Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 32

- Kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 33

- Pengendali Ekosistem Hutan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan.
- Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Sumringah, S.Hut, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2006, Jabatan Kepala Bidang Fungsional, diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda terhitung mulai tanggal 1-11-2006 dengan angka kredit sebesar 300,15 mengingat jabatan Sdr. Sumringah, S.Hut. lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, yaitu 1-11-2006 sampai dengan 1-11-2011 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yakni Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan angka kredit paling rendah sebesar 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir Nopember 2011, dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Muda.

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh: ...

Contoh:

Sdr. Khasiat, S.Hut. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-4-2006, bekerja pada Dinas Kehutanan, terhitung mulai tanggal 1-9-2007 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama dengan angka kredit sebesar 125, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama yaitu 1-9-2007 sampai dengan 1-9-2012 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit sebesar 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan September 2012 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama.

- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Hutanwati Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1-4-2009 dengan angka kredit 63, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir yaitu 1-4-2009 sampai dengan 30-3-2014 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan angka kredit kumulatif 80 maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-3-2014 dibebaskan sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana.

- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

c.menjalani ...

- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 35

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena:
- a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2)Pengendali ...

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 38

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 39

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya tidak mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 41

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Kementerian Kehutanan wajib melaksanakan:

- a. penetapan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. penetapan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- d. pengusulan ...

- d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan petunjuk pelaksanaannya;
- g. penetapan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengendali Ekosistem Hutan;
- i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
- l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
- m. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; dan
- n. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 42

Ketentuan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) berlaku paling lambat akhir Desember 2015.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya ; dan
- b.Keputusan

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ttd.

EKO SUTRISNO

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 293

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
b.
.....;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

Menetapkan

:

PERTAMA

:

MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA

:

..... **)

KETIGA

:

..... **)

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
- 1. Menteri Kehutanan;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara..... dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.....;

b.

.....;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012;

5.

Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a.

Nama

:

.....

b.

NIP

:

.....

c.

Pangkat/golongan ruang/TMT

:

.....

d.

Unit kerja

:

.....

dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA

:

..... **)

KETIGA

:

..... **)

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Menteri Kehutanan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI
TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONAL DARI TERAMPIL KE AHLI
NOMOR:
Instansi: Masa Penilaian:

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|------|------|--------|--------------|--|
| I | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
| | 1 | Nama | | | | | | |
| | 2 | NIP | | | | | | |
| | 3 | Nomor Seri KARPEG | | | | | | |
| | 4 | Pangkat/Golongan ruang TMT | | | | | | |
| | 5 | Tempat dan Tanggal lahir | | | | | | |
| | 6 | Jenis Kelamin | | | | | | |
| | 7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | | | | | |
| | 8 | Jabatan Fungsional/TMT | | | | | | |
| | 9 | Unit Kerja | | | | | | |
| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | | | LAMA | BARU | JUMLAH | PER-PINDAHAN | |
| | 1. | UNSUR UTAMA | | | | | | |
| | | A | Pendidikan 1) Pendidikan formal | | | | | |
| | | | 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTP) | | | | | |
| | | | 3) Pendidikan Prajabatan Gol II | | | | | |
| | | B | Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | C | Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | D | Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | E | Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | F | Pengembangan Profesi | | | | | |
| | | Jumlah Unsur Utama | | | | | | |
| | 2. | UNSUR PENUNJANG PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN | | | | | | |
| | | Penunjang Tugas Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | |
| | | Jumlah Unsur Penunjang | | | | | | |
| | | JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | | | | | | |
| | III | Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil jenjang pangkat gol.ruang ke jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit | | | | | | |

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA PEMULA
Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---------------------------|------|------|--------|--|--|
| 1. | Nama | : | | | | | | | | |
| 2. | N I P | : | | | | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | : | | | | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | | | | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | : | | | | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | : | | | | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | : | | | | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | |
| | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | |
| | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | | | |
| | | | 1) | Sarjana Muda/Diploma III | | | | | | |
| | | | 2) | Diploma II | | | | | | |
| | | | 3) | SLTA | | | | | | |
| | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | |
| | | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | | | |
| | 2) | | lamanya antara 641-960 jam | | | | | | | |
| | 3) | | lamanya antara 481-640 jam | | | | | | | |
| | 4) | | lamanya antara 161-480 jam | | | | | | | |
| | 5) | | lamanya antara 81-160 jam | | | | | | | |
| | 6) | | lamanya antara 31-80 jam | | | | | | | |
| | 7) | | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | | |
| | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II | | | | | | | |
| | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Rencana kerja PEH | | | | | | | | |
| | | | Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota | | | | | | | |
| | 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | | |
| | | | Inventarisasi terestris | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan inventarisasi dan mengolah data | | | | | | |
| | | | | a) | Flora, sebagai anggota | | | | | |
| | | | | b) | Fauna, sebagai anggota | | | | | |
| | | | | c) | Sosekbud, sebagai anggota | | | | | |
| | | | | d) | Geofisik, sebagai anggota | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|----------------------|------|-------------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | |
| | | 3) | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | |
| | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | |
| | | | Penetapan kawasan | | | | |
| | | | Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan | | | | |
| | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | |
| | | 1) | Pengujian dan penilaian | | | | |
| | | | a) Pengujian dan penilaian bibit | | | | |
| | | | Mengumpulkan bahan | | | | |
| | | | b) Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit | | | | |
| | | | Mengumpulkan bahan | | | | |
| | | | c) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera | | | | |
| | | | Melakukan pemeriksaan administrasi | | | | |
| | | | d) Penilaian tenaga teknis PHPL | | | | |
| | | | Melakukan pemeriksaan administrasi | | | | |
| | | | e) Penilaian penatausahaan hasil hutan | | | | |
| | | | melakukan Entry data | | | | |
| | | 2) | Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran | | | | |
| | | | melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam | | | | |
| | | 3) | Perbenihan | | | | |
| | | | a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG | | | | |
| | | | Membangun | | | | |
| | | | 1. Merintis dan memasang patok batas | | | | |
| | | | 2. Membersihkan dan menyiapkan lahan | | | | |
| | | | 3. Mempersiapkan bibit | | | | |
| | | | 4. Menanam bibit | | | | |
| | | | b) penanganan buah dan benih | | | | |
| | | | Melakukan Sortasi | | | | |
| | | 4) | Persuteraan Alam | | | | |
| | | | Pemeliharaan ulat sutera | | | | |
| | | | Pemeliharaan bibit induk ulat sutera | | | | |
| | | | Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan | | | | |
| | | D. | Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan | | | | |
| | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | |
| | | | a) Pencegahan | | | | |
| | | | melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | |
| | | | b) Pemadaman | | | | |
| | | | Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan | | | | |
| | | 2) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | |
| | | | a) Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan | | | | |
| | | | Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran | | | | |
| | | E. | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| | | | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | |
| | | | Pembinaan areal model | | | | |
| | | | Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti | | | | |
| | | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | |
| | | | Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan | | | | |
| | | | 1) Melakukan digitasi peta | | | | |
| | | | 2) Melakukan entry data non spasial | | | | |
| | | | 3) Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi | | | | |
| | | | 4) Scanning peta | | | | |
| | | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | |
| | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | |
| | | | a) Membuat leaflet | | | | |
| | | | b) Membuat poster/banner/baliho | | | | |
| | | | c) Membuat buletin | | | | |
| | | | d) Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | |
| | | | e) Melakukan pameran/display | | | | |
| | | | f) Membuat papan informasi | | | | |
| | | | g) Membuat buklet | | | | |
| | | | h) Membuat audio visual | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | i) | Membuat sinopsis | | | | | | | | |
| | | | | j) | Membuat slide | | | | | | | | |
| | | | 2) | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | | |
| | | | | Melaksanakan pameran | | | | | | | | | |
| | 4. | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | | | | |
| | | B. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | C. | Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Studi banding | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Kunjungan kerja | | | | | | | | | |
| | | | 3) | Magang | | | | | | | | | |
| | 5. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Memantau | | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | | |
| | | B. | Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | | | | | |
| | 6. | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | | |
| | | | 2) | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | | |
| | | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | | |
| | | | 5) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | | | |
| | | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | | |
| | | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | | | | |
| | | C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6 | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|------|-------------|------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | |
| | | | 1) pemrasaran | | | | | | | |
| | | | 2) moderator / pembahas / narasumber | | | | | | | |
| | | | 3) peserta | | | | | | | |
| | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | |
| | | | 1) Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | | |
| | | | a) Pengurus aktif | | | | | | | |
| | | | b) Anggota aktif | | | | | | | |
| | | | 2) Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | | |
| | | | a) Pengurus aktif | | | | | | | |
| | | | b) Anggota aktif | | | | | | | |
| | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | | |
| | | | 1) Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: | | | | | | | |
| | | | a) 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | | |
| | | | b) 20 (dua puluh) tahun | | | | | | | |
| | | | c) 10 (sepuluh) tahun | | | | | | | |
| | | | 2) Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | | |
| | | | 3) Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | | |
| | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | | |
| | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | | |
| | | 1) Sarjana/ D IV | | | | | | | | |
| | | 2) Pasca Sarjana | | | | | | | | |
| | | 3) Doktor | | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>NIP.</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP.</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP.</div> <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP.</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP .</div> |

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|-------------|------|------|--------|--|
| 1. | Nama | | | : | | | | | | |
| 2. | N I P | | | : | | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | | | : | | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | | | : | | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | | | : | | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | | : | | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | | | : | | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | | | : | | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | | | : | | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | | | : | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| | | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | | |
| | | | 1) | Sarjana Muda/Diploma III | | | | | | |
| | | | 2) | Diploma II | | | | | | |
| | | | 3) | SLTA | | | | | | |
| | | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | | |
| | | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | | | |
| | | | 2) | lamanya antara 641-960 jam | | | | | | |
| | | | 3) | lamanya antara 481-640 jam | | | | | | |
| | | | 4) | lamanya antara 161-480 jam | | | | | | |
| | | | 5) | lamanya antara 81-160 jam | | | | | | |
| | | | 6) | lamanya antara 31-80 jam | | | | | | |
| | | | 7) | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | |
| | | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II | | | | | | | |
| | | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Rencana kerja PEH | | | | | | | |
| | | | | Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota | | | | | | |
| | 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | | | 2) | Inventarisasi terestris | | | | | | |
| | | | a) | Melakukan inventarisasi dan mengolah data | | | | | | |
| | | | 1. | Flora, sebagai anggota | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|----|---|---|--------|-------------|------|---------------------------------------|--|--|--|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Fauna, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | Sosekbud, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. | Geofisik, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c) | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3) | Inventarisasi Non terestris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Persiapan inventarisasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | b) | Pengelolaan Citra Satelit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan orientasi citra dan pengenalan data | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4) | Analisa data hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menyajikan peta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Skala besar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | b) | Skala sedang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | c) | Skala kecil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1) | Penataan batas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | a) | Memancang batas sementara | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | Mengumumkan pemancangan batas sementara | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | Memancang batas definitif | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | d) | Membuat laporan hasil pembahasan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | e) | Membuat Berita Acara Penataan Batas | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2) | Pengukuran kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | a) | Pengambilan titik koordinat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3) | Penetapan kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4) | Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Pengujian dan penilaian | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | a) | Penilaian rencana pengelolaan hutan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | |
| | | | | | | b) | Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | c) | Pengujian dan penilaian benih | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | d) | Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | e) | Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | f) | Penilaian tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | g) | Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Memeriksa kelayakan fungsi sarana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | h) | Penilaian penatausahaan hasil hutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menelaah administrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) | Sertifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | a) | Sertifikasi mutu benih tanaman hutan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Melaksanakan pengambilan sampel benih | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Melakukan labelisasi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | b) | Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan pengambilan sampel bibit | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c) | Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan pengamatan sampel ulat | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | d) | Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengidentifikasi calon | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Penangkaran/Budidaya | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | a) | Mendata hasil penangkaran/budidaya. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | b) | Melaksanakan Tagging | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|----|--|----------------------|------|-------------|------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4) | Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan | | | | | | |
| | | | a) | menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam | | | | | | |
| | | | b) | melaksanakan pelayanan wisata alam | | | | | | |
| | | | c) | memungut iuran PNBP | | | | | | |
| | | | 5) | Perbenihan | | | | | | |
| | | | a) | Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG | | | | | | |
| | | | | Membangun | | | | | | |
| | | | | 1. Mengukur batas lokasi dan jalur | | | | | | |
| | | | | 2. Menanam bibit | | | | | | |
| | | | b) | Melaksanakan eksplorasi benih | | | | | | |
| | | | | Mengunduh buah | | | | | | |
| | | | c) | penanganan buah dan benih | | | | | | |
| | | | | 1. Melakukan Ekstraksi | | | | | | |
| | | | | 2. Melakukan Pengeringan | | | | | | |
| | | | | 3. Melakukan Penyimpanan | | | | | | |
| | | | 6) | Persuteraan Alam | | | | | | |
| | | | a) | Pemeliharaan ulat sutera | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan bibit induk ulat sutera | | | | | | |
| | | | | Melaksanakan hakitate | | | | | | |
| | | | b) | Pengendalian hama dan penyakit | | | | | | |
| | | | | Melaksanakan pengambilan sampel | | | | | | |
| | | | 7) | Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa | | | | | | |
| | | | a) | Membuat herbarium/spesimen satwa | | | | | | |
| | | | b) | Memelihara herbarium/spesimen satwa | | | | | | |
| | | | 8) | Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) | | | | | | |
| | | | | Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN) | | | | | | |
| | | | D. | Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan | | | | | | |
| | | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | |
| | | | a) | Pencegahan | | | | | | |
| | | | | melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | |
| | | | b) | Pemadaman | | | | | | |
| | | | | Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan | | | | | | |
| | | | 2) | Pembinaan habitat dan satwa liar | | | | | | |
| | | | a) | melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa | | | | | | |
| | | | b) | menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa | | | | | | |
| | | | c) | melakukan transplantasi terumbu karang | | | | | | |
| | | | 3) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | |
| | | | a) | Penanganan medis terhadap satwa | | | | | | |
| | | | | melakukan pengambilan sampel untuk uji | | | | | | |
| | | | b) | melaksanakan permanent/temporary sample plot | | | | | | |
| | | | | pengamatan | | | | | | |
| | | | c) | Melaksanakan rehabilitasi satwa | | | | | | |
| | | | 4) | Pengelolaan DAS dan tata air | | | | | | |
| | | | | Melakukan pengukuran TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air | | | | | | |
| | | | E. | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| | | | | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | |
| | | | | Pembinaan areal model | | | | | | |
| | | | | Menyelenggarakan lomba cinta alam | | | | | | |
| | | | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | |
| | | | | Sistem informasi manajemen | | | | | | |
| | | | | mengentry data | | | | | | |
| | | | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | |
| | | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | |
| | | | a) | Membuat leaflet | | | | | | |
| | | | b) | Membuat poster/banner/baliho | | | | | | |
| | | | c) | Membuat buletin | | | | | | |
| | | | d) | Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | |
| | | | e) | Melakukan pameran/display | | | | | | |
| | | | f) | Membuat papan informasi | | | | | | |
| | | | g) | Membuat buklet | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | h) | Membuat audio visual | | | | | | |
| | | | i) | Membuat sinopsis | | | | | | |
| | | | j) | Membuat slide | | | | | | |
| | | 2) | Sosialisasi /diseminasi | | | | | | | |
| | | | | | Melaksanakan pameran | | | | | |
| | 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | | B. | Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | | C. | Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | | D. | Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | | |
| | 2) | | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | | |
| | | E. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | |
| | | F. | Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | 1) | Studi banding | | | | | | | |
| | 2) Kunjungan kerja | | | | | | | | | |
| | 3) Magang | | | | | | | | | |
| | | G. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | |
| | 5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Memantau | | | | | | | |
| | | 1) | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | |
| | 2) | | Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota | | | | | | | |
| | | B. | Evaluasi | | | | | | | |
| | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | | |
| | 6. PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | | | |
| | | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | a) | | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | |
| | | 2) | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | |
| | b) | | dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | b) | | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | |
| | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | | | |
| | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | | | |
| | | | 5) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | | | |
| | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | | |
| | b) | | | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | | | |
| | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | | | |
| | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | | | |
| | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | | | | | | |
| | C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6 | | | | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | | | |
| | | 1) | | pemrasaran | | | | | | | | | |
| | | 2) | | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | | | | |
| | | 3) | | peserta | | | | | | | | | |
| | | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | | | | |
| | | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | | | |
| | | 1) | | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | | |
| | | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | | |
| | | 2) | | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | | |
| | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | | | |
| | | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | |
| | | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) | Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | | | | | | | | |
| | | | | a) | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | | | |
| | | | | b) | 20 (dua puluh) tahun | | | | | | | | |
| | | | | c) | 10 (sepuluh) tahun | | | | | | | | |
| | | 2) | | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | | | | |
| | | 3) | | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | | | | |
| | | F. | | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | | | |
| | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Sarjana/ D IV | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Pasca Sarjana | | | | | | | | | |
| | | | 3) | Doktor | | | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>NIP. _____</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP . _____</div> |

LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA LANJUTAN
NOMOR:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--------|-------------|------|--------|
| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
| 1. | Nama | | : | | | | | |
| 2. | N I P | | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | | : | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | UNSUR UTAMA | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | |
| | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | | 1) | Sarjana Muda/Diploma III | | | | | |
| | | 2) | Diploma II | | | | | |
| | | 3) | SLTA | | | | | |
| | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | |
| | | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | |
| | 2) | | lamanya antara 641-960 jam | | | | | |
| | 3) | | lamanya antara 481-640 jam | | | | | |
| | 4) | | lamanya antara 161-480 jam | | | | | |
| | 5) | | lamanya antara 81-160 jam | | | | | |
| | 6) | | lamanya antara 31-80 jam | | | | | |
| | 7) | | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | |
| | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II | | | | | |
| | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | |
| | | | Penyusunan Rencana kerja PEH | | | | | |
| Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota | | | | | | | | |
| 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | |
| | | 1) | Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota | | | | | |
| | | | Inventarisasi terrestris | | | | | |
| | | a) | Persiapan inventarisasi | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---|--|-------------|------|--------|----|---|---|---|--|--|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | b) | Melakukan inventarisasi dan mengolah data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | Flora, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | Fauna, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Sosekbud, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | Geofisik, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | c) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | d) | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3) | Inventarisasi Non terestris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Geography Positioning System (GPS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) | Melakukan pengukuran titik GPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | b) | Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | c) | Membuat peta hasil pengolahan titik GPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengukuran kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Pengujian dan penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) | Penilaian rencana pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1. | Menganalisis data | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2. | Melakukan penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melakukan pengujian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c) | Pengujian dan penilaian bibit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | d) | Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melakukan seleksi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e) | Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | f) | Penilaian penatausahaan hasil hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Memeriksa lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Sertifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) | Sertifikasi sumber benih tanaman hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengidentifikasi calon sumber benih | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) | Sertifikasi mutu benih tanaman hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | Melaksanakan pengujian kemurnian benih | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | | Melaksanakan pengujian berat 1000 butir | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | c) | Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | d) | Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3) | Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) | melaksanakan interpretasi pariwisata alam | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) | melakukan wisata pendidikan | | | | | | | | | | | |
| 4) | Perbenihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a) | Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. | Membangun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Mengambil data perkembangan bibit induk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2. | Memelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | b) | penanganan buah dan benih | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Melakukan Pengepakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) | Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a) | Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan tabulasi data | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|----|--|--|-------------|---|--|---|--|-----------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | Pemeliharaan ulat sutera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | Pemeliharaan bibit induk ulat sutera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengambil data perkembangan bibit induk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Memelihara kebun Bibit Murbei | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c) | Pengendalian hama dan penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melaksanakan pengendalian hama | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6) | Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7) | Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D. | Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | a) | Pencegahan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | b) | Pemadaman | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | c) | Penanganan pasca kebakaran | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2) | Pembinaan habitat dan satwa liar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a) | melakukan pembinaan habitat pelindung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | b) | melakukan penjarangan populasi satwa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | c) | melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a) | melaksanakan permanent/temporary sample plot | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | penetapan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | b) | Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | Melaksanakan pelepas liaran satwa | | | | | | | |
| | | | | | | | | E. | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Pembinaan Kemitraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan pendampingan kader | | | | | | | |
| | | | | 2) | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan areal model | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melaksanakan kemah konservasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Membuat komposisi peta hasil digitasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2) | Menyusun dan melakukan pengelolaan library | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G. | Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Menyiapkan bahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | a) | Membuat leaflet | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | b) | Membuat poster/banner/baliho | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | c) | Membuat buletin | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | d) | Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | e) | Melakukan pameran/display | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | f) | Membuat papan informasi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | g) | Membuat buklet | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | h) | Membuat audio visual | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | i) | Membuat sinopsis | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | j) | Membuat slide | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2) | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | |
| | | | Melaksanakan pameran | | | | | | |
| | 4. | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | A. | Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | B. | Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | C. | Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | D. | Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | |
| | | 2) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | |
| | E. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | |
| | F. | Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian | | | | | | | |
| | | 1) | Studi banding | | | | | | |
| | | 2) | Kunjungan kerja | | | | | | |
| | | 3) | Magang | | | | | | |
| | G. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | 5. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | A. | Memantau | | | | | | | |
| | | 1) | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | |
| | | 2) | Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota | | | | | | |
| | B. | Evaluasi | | | | | | | |
| | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | |
| | 6. | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | |
| | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | 2) | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | |
| | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 5) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | |
| | | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | |
| | | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara | | | | | | |
| | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | |
| | | C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6 | | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | |
| | | | 1) | pemrasaran | | | | | | |
| | | | 2) | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | |
| | | | 3) | peserta | | | | | | |
| | | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | |
| | | | 1) | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | |
| | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | |
| | | | b) | Anggota aktif | | | | | | |
| | | | 2) | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | |
| | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | |
| | | | b) | Anggota aktif | | | | | | |
| | | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | |
| | | | 1) | Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | | | | | | |
| | | | a) | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | |
| | | | b) | 20 (dua puluh) tahun | | | | | | |
| | | | c) | 10 (sepuluh) tahun | | | | | | |
| | | | 2) | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| | | | 3) | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | |
| | | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | |
| | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | | |
| | | 1) | Sarjana/ D IV | | | | | | | |
| | | 2) | Pasca Sarjana | | | | | | | |
| | | 3) | Doktor | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|---|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>NIP. _____</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP . _____</div> |

LAMPIRAN IV-D
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|-------------|------|--------|
| 1. | Nama | : | | | | | |
| 2. | N I P | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | : | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | UNSUR UTAMA | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | |
| | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | |
| | | 1) | Sarjana Muda/Diploma III | | | | |
| | | 2) | Diploma II | | | | |
| | | 3) | SLTA | | | | |
| | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | |
| | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | |
| | | 2) | lamanya antara 641-960 jam | | | | |
| | | 3) | lamanya antara 481-640 jam | | | | |
| | | 4) | lamanya antara 161-480 jam | | | | |
| | | 5) | lamanya antara 81-160 jam | | | | |
| | | 6) | lamanya antara 31-80 jam | | | | |
| | | 7) | lamanya kurang dari 30 jam | | | | |
| | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | |
| | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II | | | | | |
| | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | |
| | | Penyusunan Rencana kerja PEH | | | | | |
| | | Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota | | | | | |
| | 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | |
| | | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | |
| | | | 1) | Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai angota | | | |
| | | | 2) | Inventarisasi terestris | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|----|---|------|-------------|------|------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | Melakukan inventarisasi dan mengolah data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. Flora, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. Fauna, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. Sosekbud, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4. Geofisik, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c) | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1) | Pengukuran kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Membuat proyeksi titik ukur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2) | Penetapan kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Mengelola data base tata batas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1) | Pengujian dan penilaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) Penilaian rencana pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c) Penilaian tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memberikan saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL penyegaran, pembekuan atau pencabutan Kartu tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | d) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Merumuskan saran dan tindak lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e) Penilaian penatausahaan hasil hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1. Melakukan Cross chek dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2. Memberikan saran tindak lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2) | Sertifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | a) | Sertifikasi sumber benih tanaman hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mendeskripsikan calon sumber benih | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | b) | Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Merumuskan saran dan tindak lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3) | Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4) | Perbenihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan eksplorasi benih | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengamati bunga dan buah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5) | Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengumpulkan data primer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | D. | Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) Pencegahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. menelaah hasil pelaksanaan geladi/simulasi/ penanggulangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) Pemadaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c) Penanganan pasca kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Pembinaan habitat dan satwa liar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan pengembangan habitat | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan permanent/temporary sample plot | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pengembangan | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------|---|------|------|--------|------|------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | |
| | | | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | E. | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Pembinaan Kemitraan | | | | | | | | | |
| | | | Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter) | | | | | | | | | |
| | | | | menyusun bahan naskah kemitraan | | | | | | | | |
| | | | 2) | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan areal model | | | | | | | | | |
| | a) | | Mencatat hasil dan manfaat dampak | | | | | | | | | |
| | b) | | Mengelola/membimbing camping ground | | | | | | | | | |
| | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Sistem informasi manajemen | | | | | | | | | |
| | | | menyajikan data | | | | | | | | | |
| | | 2) | Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan | | | | | | | | | |
| | | a) | Melakukan kendali mutu hasil digitasi | | | | | | | | | |
| | | b) | Melakukan penyajian dan pemutakhiran data | | | | | | | | | |
| | G. | Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | Menjadi saksi ahli | | | | | | | | | | |
| | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | | | | |
| | | | a) | Membuat leaflet | | | | | | | | |
| | | | b) | Membuat poster/banner/baliho | | | | | | | | |
| | | | c) | Membuat buletin | | | | | | | | |
| | | | d) | Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | | | |
| | | | e) | Melakukan pameran/display | | | | | | | | |
| | | | f) | Membuat papan informasi | | | | | | | | |
| | | | g) | Membuat buklet | | | | | | | | |
| | | | h) | Membuat audio visual | | | | | | | | |
| | | | i) | Membuat sinopsis | | | | | | | | |
| | | | j) | Membuat slide | | | | | | | | |
| | | 2) | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | | |
| | | | Melaksanakan pameran | | | | | | | | | |
| | | 4. | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | |
| | | B. | Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | C. | Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | |
| | | D. | Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | | | |
| | | | 2) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | | | |
| | | E. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | F. | Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Studi banding | | | | | | | | |
| | | | 2) | Kunjungan kerja | | | | | | | | |
| | | | 3) | Magang | | | | | | | | |
| | | G. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | |
| | | 5. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Memantau | | | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|-------------|------|--------|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | 1) | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, | | | | | | | | |
| | | | 2) | Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota | | | | | | | | |
| | | B. | Evaluasi | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | | | |
| | 6. | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | | | | |
| | | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem | | | | | | | | | |
| | | | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | |
| | | 2) | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | | |
| | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | 5) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | | |
| | | | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | |
| | | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | C. | | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6 | | | | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | |
| | | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | |
| | | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | | |
| | | 1) | | pemrasaran | | | | | | | | |
| | | 2) | | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | | | |
| | | 3) | | peserta | | | | | | | | |
| | | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | | | |
| | | | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----|--|----|--|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 1) | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | |
| | | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | |
| | | | | 2) | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | |
| | | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | |
| | | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | |
| | | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) | Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | | | | | | |
| | | | | | a) | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | |
| | | | | | b) | 20 (dua puluh) tahun | | | | | | |
| | | | | | c) | 10 (sepuluh) tahun | | | | | | |
| | | | | | 2) | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| | | 3) | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | | | | |
| | | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | | |
| | | | | | 1) | Sarjana/ D IV | | | | | | |
| | | | | | 2) | Pasca Sarjana | | | | | | |
| | | | | | 3) | Doktor | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|---|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>NIP.</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP.</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP.</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP.</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP .</div> |

LAMPIRAN V-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----------------------------|------|-------------|------|------|--------|--|
| 1. | Nama | | : | | | | | | | |
| 2. | N I P | | : | | | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | | : | | | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | | : | | | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | | : | | | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | : | | | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | | : | | | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | | : | | | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | | : | | | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | | : | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I. | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| | | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | | | |
| | | | 1) | Doktor | | | | | | |
| | | | 2) | Pasca Sarjana | | | | | | |
| | | | 3) | Sarjana/Diploma IV | | | | | | |
| | | B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | |
| | | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | | | |
| | | | 2) | lamanya antara 641-960 jam | | | | | | |
| | | | 3) | lamanya antara 481-640 jam | | | | | | |
| | | | 4) | lamanya antara 161-480 jam | | | | | | |
| | | | 5) | lamanya antara 81-160 jam | | | | | | |
| | | | 6) | lamanya antara 31-80 jam | | | | | | |
| | | | 7) | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | |
| | | C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | | | | | | | |
| | | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | | Penyusunan rencana kerja PEH | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | | Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota | | | | | | | |
| | 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | | A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | | | |
| | | | 1) Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----|---|--|---|-------------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | | | 2) | Inventarisasi terestris | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Melakukan inventarisasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Flora, sebagai Ketua | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fauna, sebagai Ketua | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sosekbud, sebagai Ketua | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Geofisik, sebagai Ketua | | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) | Inventarisasi Non terestris | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Geography Positioning System (GPS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Mengolah data GPS termasuk unduh data | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menganalisis hasil pengolahan data GPS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Pengelolaan Citra Satelit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. | Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Mengumpulkan referensi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menguji hasil penafsiran di lapangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital | | | | | | | | | | |
| | | | | | Menyajikan hasil penafsiran digital | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4) | Analisa data hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menghitung neraca sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) | Penataan batas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | Membahas trayek batas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengecekan pal batas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) | Penetapan kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan uji petik tata batas di lapangan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3) | Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4) | Pemantapan wilayah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Perubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/ Penunjukan /Penggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. | Menelaah peta dan data terkait | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan evaluasi lapangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan skoring | | | | | | | | | | |
| | | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) | Perijinan pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | | Kawasan hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | | Hasil hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | c) | | Jasa lingkungan dan wisata alam | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | d) | | Industri hasil hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri | | | | | | | | | | | |
| | | | | e) | | Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan penilaian | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) | | Pengujian dan penilaian | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | | Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. | Mengentry data | | | | | | | | | | |
| | | | | | Menganalisis data | | | | | | | | | | | | |
| Melakukan uji petik | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|----|--|---|--------|-------------|------|--------|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | | | b) | Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | | |
| | | | | | Menganalisis data | | | | | | | | | |
| | | | | c) | Pengujian dan penilaian benih | | | | | | | | | |
| | | | | | Menganalisis data | | | | | | | | | |
| | | | | d) | Pengujian dan penilaian bibit | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penilaian | | | | | | | | | |
| | | | | e) | Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penilaian | | | | | | | | | |
| | | | | f) | Pengujian mutu persuteraan alam | | | | | | | | | |
| | | | | | Melaksanakan kegiatan pengujian mutu | | | | | | | | | |
| | | | | g) | Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan seleksi | | | | | | | | | |
| | | | | h) | Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan) | | | | | | | | | |
| | | | | | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | |
| | | | | i) | Penilaian dokumen iuran kehutanan | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. Melakukan Entry data | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Menelaah administrasi | | | | | | | | | |
| | | | | j) | Penilaian kegiatan industri hasil hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | Menelaah administrasi | | | | | | | | | |
| | | | | k) | Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK- | | | | | | | | | |
| | | | | | Melaksanakan pemeriksaan administrasi | | | | | | | | | |
| | | | | 3) | Sertifikasi | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | |
| | | | | | | Melaksanakan pengambilan sample | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Sertifikasi jasa lingkungan | | | | | | | | |
| | | | | | | Menganalisis data | | | | | | | | |
| | | | | | c) | Sertifikasi sumber benih tanaman hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih | | | | | | | | |
| | | | | | d) | Sertifikasi mutu benih tanaman hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. Melaksanakan pengujian kadar air benih | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. Melaksanakan pengujian daya kecambah benih | | | | | | | | |
| | | | | | e) | Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | Menganalis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit | | | | | | | | |
| | | | | | f) | Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1 | | | | | | | | |
| | | | | | g) | Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengolah dan menganalisa | | | | | | | | |
| | | | | 4) | Penangkaran/Budidaya | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya | | | | | | | | |
| | | | | 5) | Pemasaran hasil hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan | | | | | | | | |
| | | | | 6) | Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung | | | | | | | | |
| | | | | 7) | Pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitas pelaksanaan kegiatan HTR | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengumpulkan data dan peta | | | | | | | | |
| | | | | 8) | Pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL | | | | | | | | |
| | | | | 9) | Perbenihan | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG | | | | | | | | |
| | | | | | | Membangun | | | | | | | | |
| | | | | | | Membuat peta dan layout penanaman | | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------|-------------|------|------|--------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pembibitan dan persemaian | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Memelihara bibit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10) | Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) | Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. Menyusun instrumen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. Menyiapkan kebutuhan personil | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pengendalian hama dan penyakit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melaksanakan pengujian sampel | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c) | Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. Inventarisasi potensi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. Membuat peta potensi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11) | Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12) | Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | D. Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a) | Pencegahan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pemadaman | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. mengkaji tingkah laku/watak api | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c) | Penanganan pasca kebakaran | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. mengembangkan teknik evaluasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. menganalisis dampak kebakaran hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3. mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Pembinaan habitat dan satwa liar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) | Penanganan medis terhadap satwa | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | melaksanakan demplot penangkaran | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c) | melaksanakan permanent/temporary sample plot | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | pengolahan data dan analisa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | d) | Menangani konflik satwa liar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e) | mengembangkan konsep pelepas liaran satwa | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4) | Pengelolaan DAS dan tata air | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melakukan analisa data TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5) | Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) | Menyusun instrumen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | b) Mengumpulkan data primer | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Kelembagaan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a) | Pembinaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Melakukan Bimbingan teknis | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pengembangan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1. Menentukan tujuan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Pembinaan Kemitraan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a) | Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | merekrut kader | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b) | Pelaku Usaha Sektor Kehutanan | | | | | | | | | | | |
| | Mengumpulkan data dan informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|----|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------------|------|--------|--|--|--|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | | 3) | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | Pembentukan areal model | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | mempersiapkan kelompok sasaran | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | mempersiapkan lokasi | | | | | | | | | | |
| | | | b) | Pembinaan areal model | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model | | | | | | | | | | |
| | | | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) | Sistem informasi manajemen | | | | | | | | |
| | | | | | | | mengolah data/up dating data | | | | | | | | |
| | | | | | | 2) | Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Melakukan back up data rutin | | | | | | | | |
| | | | | | | | Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG | | | | | | | | |
| | | | | | | 3) | Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen | | | | | | | | |
| | | | | | | | menginventarisasi kebutuhan data dan informasi | | | | | | | | |
| | | | | | | G. | Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | | Menjadi saksi ahli | | | | | | | | | | |
| | | | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | membuat leaflet | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat poster/banner/baliho | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat buletin | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | | | |
| | | | | | | | melakukan pameran/display | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat papan informasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat buklet | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat audio visual | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat sinopsis | | | | | | | | |
| | | | | | | | membuat slide | | | | | | | | |
| | | | | | | menyusun konsep informasi teknis | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2) | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | melaksanakan pameran | | | | | | | | |
| | | | 4. | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | A. | Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota | | | | | | | | |
| | | | | | | B. | Penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota | | | | | | | | |
| | | | | | | C. | Penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai anggota | | | | | | | | |
| | | | | | | D. | Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | | | |
| | | | | | | E. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | F. | Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Studi banding | | | | | | |
| | | | | | | | | 2) | Kunjungan kerja | | | | | | |
| | | | | | | | | 3) | Magang | | | | | | |
| | | | | | | G. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|------|--------|-------------|------|--------|--|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota | | | | | | | |
| | 5. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Memantau | | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota | | | | | | | |
| | | | 2) | Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota | | | | | | | |
| | | B. | Evaluasi | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | | |
| | 6. | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | | | |
| | | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 2) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 6) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | |
| | | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | | |
| | | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | | |
| | | C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6 | | | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | | |

| NO | | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|--|--|--|
| | | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | |
| | | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | |
| | | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | 1. | pemrasaran | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | peserta | | | | | | | | | | | |
| | C. | | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | Anggota aktif | | | | | | | | | | |
| | D. | | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | E. | | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: | | | | | | | | | | | |
| | | | | a) | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | | | | | |
| | | | | b) | 20 (dua puluh) tahun | | | | | | | | | | |
| | | | | c) | 10 (sepuluh) tahun | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | | | | | | |
| | F. | | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | | | | | | |
| | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Sarjana/ D IV | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Pasca Sarjana | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Doktor | | | | | | | | | | | |
| | | | JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>NIP. _____</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP . _____</div> |

LAMPIRAN V-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA
NOMOR:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
|-----|--|--|---|------|-------------|------|------|--------|
| 1. | Nama | | : | | | | | |
| 2. | N I P | | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan / TMT | | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | | : | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | |
| | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | UNSUR UTAMA | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | |
| | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | | 1) | Doktor | | | | | |
| | | 2) | Pasca Sarjana | | | | | |
| | | 3) | Sarjana/Diploma IV | | | | | |
| | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | |
| | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | | |
| | | 2) | lamanya antara 641-960 jam | | | | | |
| | | 3) | lamanya antara 481-640 jam | | | | | |
| | | 4) | lamanya antara 161-480 jam | | | | | |
| | | 5) | lamanya antara 81-160 jam | | | | | |
| | | 6) | lamanya antara 31-80 jam | | | | | |
| | | 7) | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | |
| | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | | | | | |
| | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | |
| | | Penyusunan rencana kerja PEH | | | | | | |
| | | Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | |
| | | Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota | | | | | | |
| 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | |
| | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | |
| | 1) | Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | | 2) | Inventarisasi terestris | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | Enumerasi TSP/PSP, sebagai ketua | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai ketua | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3) | Inventarisasi Non terestris | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | Persiapan inventarisasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Menyusun rancangan inventarisasi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Geography Positioning System (GPS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Citra Satelit | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | Membuat mozaik citra secara digital | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Menyusun kunci penafsiran | | | | | | | | | | |
| | | | | B. | | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Pemutakhiran data kawasan hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penataan batas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Membahas hasil penataan batas definitif | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengukuran kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penetapan kawasan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penilaian tata batas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemantapan wilayah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pembentukan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1) | Perijinan pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kawasan hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja | | | | | | | | | |
| | | | | | | c) | Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan | | | | | | | | | |
| | | | Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | e) | | Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengujian dan penilaian | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | | Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Memeriksa administrasi | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | Melakukan penilaian | | | | | | | | | | |
| | | | | | b) | Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut | | | | | | | | | | |
| | | | | | c) | Pengujian dan penilaian benih | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan penilaian | | | | | | | | | | |
| | | | | | d) | Pengujian dan penilaian bibit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menganalisis data | | | | | | | | | | |
| | | | | | e) | Pengujian mutu persuteraan alam | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan pengamatan sampel | | | | | | | | | | |
| | | | | | f) | Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Memberikan rekomendasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | g) | Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan) | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | Menganalisis data | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Melakukan penilaian | | | | | | | | | | |
| | | | h) | | | Penilaian dokumen iuran kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Memeriksa lapangan | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | Melakukan Cross chek dokumen | | | | | | | | | | |
| | | | | | i) | Penilaian kegiatan industri hasil hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Memeriksa lapangan | | | | | | | | | | |

| | | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 3) Sertifikasi | | | | | | |
| | | | a) Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu | | | | | | |
| | | | Melakukan pengujian | | | | | | |
| | | | b) Sertifikasi jasa lingkungan | | | | | | |
| | | | Melakukan penilaian | | | | | | |
| | | | c) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan | | | | | | |
| | | | Menganalisis calon sumber benih | | | | | | |
| | | | d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan | | | | | | |
| | | | 1. Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz) | | | | | | |
| | | | 2. Melaksanakan pengujian cutting test | | | | | | |
| | | | e) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan | | | | | | |
| | | | Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit | | | | | | |
| | | | f) Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1 | | | | | | |
| | | | Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1 | | | | | | |
| | | | g) Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | |
| | | | Sertifikasi tenaga teknis PHPL | | | | | | |
| | | | Merumuskan saran dan tindak lanjut | | | | | | |
| | | | 4) Penangkaran/Budidaya | | | | | | |
| | | | a) Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan | | | | | | |
| | | | b) Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan | | | | | | |
| | | | 5) Pemasaran hasil hutan | | | | | | |
| | | | Menganalisis pemasaran hasil hutan | | | | | | |
| | | | 6) Pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitas pelaksanaan kegiatan HTR | | | | | | |
| | | | a) Mengolah dan menganalisa data | | | | | | |
| | | | b) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR | | | | | | |
| | | | 7) Pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari | | | | | | |
| | | | Memberikan saran tindak lanjut | | | | | | |
| | | | 8) Perbenihan | | | | | | |
| | | | a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG | | | | | | |
| | | | Membangun | | | | | | |
| | | | Membuat rancangan penanaman | | | | | | |
| | | | b) Pembibitan dan persemaian | | | | | | |
| | | | Membuat persemaian | | | | | | |
| | | | 9) Persuteraan Alam | | | | | | |
| | | | a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam | | | | | | |
| | | | Melakukan pengolahan/analisa data | | | | | | |
| | | | b) Pemeliharaan ulat sutera | | | | | | |
| | | | 1. Pemeliharaan bibit induk ulat sutera | | | | | | |
| | | | Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine | | | | | | |
| | | | 2. Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera | | | | | | |
| | | | c) Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam | | | | | | |
| | | | 1. Menganalisis potensi | | | | | | |
| | | | 2. Konsultasi publik | | | | | | |
| | | | 10) Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa | | | | | | |
| | | | Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran | | | | | | |
| | | | 11) Perburuan satwa | | | | | | |
| | | | a) Mengkaji potensi perburuan satwa | | | | | | |
| | | | b) Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa | | | | | | |
| | | | D. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan | | | | | | |
| | | | 1) Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | |
| | | | a) Pencegahan | | | | | | |
| | | | 1. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--------|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b) Pemadaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | c) Penanganan pasca kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | mengkaji prosedur Search and Rescue regu kebakaran. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2) Pembinaan habitat dan satwa liar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | melakukan kajian daya dukung kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) Penanganan medis terhadap satwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1. | malaksanakan tindakan medis terhadap satwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. | menilai kesehatan/perilaku satwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | b) menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | c) mengembangkan rehabilitasi satwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | d) mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | e) Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4) Pengelolaan DAS dan tata air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan penyusunan rekomendasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5) Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) Mengumpulkan data sekunder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | b) Menyajikan diagram dan tabel (data) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) Kelembagaan Masyarakat | | | | | a) Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | b) Pembinaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. | Melakukan Pendampingan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. | Melakukan Fasilitasi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | c) Pengembangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. | Mengkaji | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2. | menyusun kebutuhan sarana dan prasarana | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2) Pembinaan Kemitraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a) Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1. | mengembangkan kemitraan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. | mengembangkan hasil-hasil kemitraan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) Pelaku Usaha Sektor Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Melakukan fasilitasi kemitraan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3) Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a) Pembentukan areal model | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1. | menganalisa usaha RHL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | melakukan analisa permasalahan pelaksanaan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | menyusun rekomendasi pemecahan masalah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4. | menyusun naskah laporan areal model | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | b) Pembinaan areal model | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Menyusun pola pembinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. | melakukan kunjungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1) Sistem informasi manajemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | menganalisa data | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2) Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | a) mengembangkan data base non spatial | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | d) Melakukan analisa data SIG | | | | | | | | | | | | |

| NO | | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---|---|--|--|-------------|------|------|--------|--|--|--|--|--|
| | | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | |
| | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | | | |
| | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| | | 3) | Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | menyusun sistem/model/program | | | | | | | | | | | |
| | | | b) | menguji dan memvalidasi sistem/model/program | | | | | | | | | | | |
| | | | c) | menyusun manual | | | | | | | | | | | |
| | | G. | | Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan konsultasi | | | | | | | | | | | |
| | | | 2) | Menjadi saksi ahli | | | | | | | | | | | |
| | | H. | | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) | membuat leaflet | | | | | | | | | |
| | | | | | b) | membuat poster/banner/baliho | | | | | | | | | |
| | | | | | c) | membuat buletin | | | | | | | | | |
| | | | | | d) | membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | | | | |
| | | | | | e) | melakukan pameran/display | | | | | | | | | |
| | | | | | f) | membuat papan informasi | | | | | | | | | |
| | g) | | | | membuat buklet | | | | | | | | | | |
| | h) | | | | membuat audio visual | | | | | | | | | | |
| | i) | | | | membuat sinopsis | | | | | | | | | | |
| | j) | | | | membuat slide | | | | | | | | | | |
| | k) | | | | melakukan pembahasan konsep informasi teknis | | | | | | | | | | |
| | 2) | | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) | melakukan sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | | | | |
| | | b) | melaksanakan pameran | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | | | |
| | | B. | Penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai ketua | | | | | | | | | | | |
| | | C. | Penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai ketua | | | | | | | | | | | |
| | | D. | Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | | | | | | | |
| | | | | Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | | | | | | | |
| | | E. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | |
| | | F. | Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Studi banding | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kunjungan kerja | | | | | | | | | | | |
| | | | | Magang | | | | | | | | | | | |
| | G. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | | | |
| | | A. | Memantau | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai ketua | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneanan sanksi, sebagai ketua | | | | | | | | | | | |
| | | B. | Evaluasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | Melakukan evaluasi, sebagai anggota | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|---------------|------|--------|---|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | |
| | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 6. PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | | | | |
| | | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | 1) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | 2) | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | 3) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | 4) | Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | 6) | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | | | | |
| | | 1) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | | | | |
| | | | a) | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | | | | b) | dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | | |
| | | | 2) | Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | | | |
| | | | | a) | dalam bentuk buku | | | | | | |
| | | | b) | | dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | | | 3) | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6 | | | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | |
| | | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | |
| | | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | |
| | | | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | |
| | | 1. | | pemrasaran | | | | | | | |
| | | 2. | | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | | |
| | | 3. | | peserta | | | | | | | |
| | | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | | |
| | | | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | |
| | | 1. | | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | |
| | | | | | b) | Anggota aktif | | | | | |
| | | 2. | | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | | |
| | | | | a) | Pengurus aktif | | | | | | |
| | | | | | b) | Anggota aktif | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|--|------|-------------|------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | |
| | | 1. | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: | | | | | | | |
| | | | a) | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | | |
| | | | b) | 20 (dua puluh) tahun | | | | | | |
| | | | c) | 10 (sepuluh) tahun | | | | | | |
| | | 2. | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | | |
| | | 3. | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | | |
| | | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | |
| | | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | |
| | | | 1. | Sarjana/ D IV | | | | | | |
| | | | 2. | Pasca Sarjana | | | | | | |
| | | | 3. | Doktor | | | | | | |
| | JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|---|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>NIP. _____</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP . _____</div> |

LAMPIRAN V-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA
Nomor :

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|-------------|------|------|--------|--|--|--|
| 1. | Nama | | : | | | | | | | | | |
| 2. | N I P | | : | | | | | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | | : | | | | | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | | : | | | | | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | | : | | | | | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | | : | | | | | | | | | |
| 7. | Jabatan PEH/ TMT | | : | | | | | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | | : | | | | | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | | : | | | | | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | | : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | | | | | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| I. | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | | | |
| | 1. | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| | A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | | | | | |
| | | 1) | Doktor | | | | | | | | | |
| | | | Pasca Sarjana | | | | | | | | | |
| | | | Sarjana/Diploma IV | | | | | | | | | |
| | B. | Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | | | |
| | | 1) | lamanya lebih dari 960 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya antara 641-960 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya antara 481-640 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya antara 161-480 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya antara 81-160 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya antara 31-80 jam | | | | | | | | | |
| | | | lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | | | | |
| | | C. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | | | | | | | | | |
| | 2. | PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan rencana kerja PEH | | | | | | | | | |
| | | | | Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | |
| | | | | Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua | | | | | | | | |
| | 3. | PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | |
| | | A. | Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai ketua | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--------|--|---|--------|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| | | | | 2) | Inventarisasi terestris | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persiapan inventarisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Menyusun rancangan inventarisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3) | Inventarisasi Non terestris | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Citra Satelit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a. | Menganalisa hasil penafsiran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b. | Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4) | Analisa data hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a. | Menghitung potensi sumber daya hutan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | b. | Ekspose hasil inventarisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B. | Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Penataan batas | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rekalkulasi batas kawasan hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2) | Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | a. | Melaksanakan review zonasi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | b. | Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | c. | Verifikasi PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3) | Pemantapan wilayah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | a. | Perubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan /Penggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (1) | Membuat pertimbangan teknis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Identifikasi penggunaan pola ruang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Verifikasi usulan perubahan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Membuat Kajian lingkungan hidup strategis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Menyusun kriteria/indikator kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Identifikasi pola pemanfaatan ruang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Membuat laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | b. | Pembentukan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (1) | Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Membuat pertimbangan teknis dalam rangka | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Membuat model unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Melakukan kajian perubahan kawasan hutan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (8) | Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C. | Pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Perijinan pemanfaatan sumber daya hutan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a. | Kawasan hutan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (1) | Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (2) | Verifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | Hasil hutan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (1) | Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan | | | | | | |
| | | | | c. | Jasa lingkungan dan wisata alam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) | Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | d. | Industri hasil hutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) | Melakukan pengkajian usulan ijin industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Melakukan penelaahan ijin industri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | e. | Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Memberikan saran tindak lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2) | Pengujian dan penilaian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. | Penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil hutan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|----|-----|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | b. | | Pengujian dan penilaian benih |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | c. | | Pengujian dan penilaian bibit |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | d. | | Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pencedar bibit |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | e. | | Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan) |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | f. | | Penilaian dokumen iuran kehutanan |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | g. | | Penilaian kegiatan industri hasil hutan |
| | | | | | | | | | | | | | (1) | Mengolah dan menganalisa |
| | | | | | | | | | | | | | (2) | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | h. | | Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | 3) | | Sertifikasi |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | | b. | Sertifikasi jasa lingkungan |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | | c. | Sertifikasi sumber benih tanaman hutan |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | | d. | Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan |
| | | | | | | | | | | | | | | Memberikan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | 4) | | Pemasaran hasil hutan |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan |
| | | | | | | | | | | | | | b. | Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan |
| | | | | | | | | | | | | 5) | | Pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR |
| | | | | | | | | | | | | | b. | Merumuskan saran tindak lanjut |
| | | | | | | | | | | | | 6) | | Pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL |
| | | | | | | | | | | | | | b. | Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial |
| | | | | | | | | | | | | 7) | | Perbenihan |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan teknologi perbenihan |
| | | | | | | | | | | | | 8) | | Persuteraan Alam |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Pemeliharaan ulat sutera |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan bibit induk ulat sutera |
| | | | | | | | | | | | | | | Menganalisis data perkembangan bibit induk |
| | | | | | | | | | | | | | b. | Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam |
| | | | | | | | | | | | | | (1) | rekomendasi pengembangan |
| | | | | | | | | | | | | | (2) | Ekspose |
| | | | | | | | | | | | | D. | | Pengelolaan konservasi sumber daya hutan |
| | | | | | | | | | | | | | 1) | Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan |
| | | | | | | | | | | | | | a. | Pencegahan |
| | | | | | | | | | | | | | | 1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan |
| | | 2) mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut,serasah dll). | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | Pemadaman | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c. | Penanganan pasca kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | mengembangkan prosedur penyelidikan sebab- sebab kebakaran hutan. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Penanganan medis terhadap satwa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3) | Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Menyajikan hasil identifikasi masalah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E. | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Kelembagaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a. | Pembinaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (1) | Melakukan Sosialisasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (2) | Melakukan Advokasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | Pengembangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (1) | Menganalisis masalah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (2) | merumuskan struktur kelembagaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (3) | merumuskan tata hubungan kerja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (4) | merumuskan prosedur kerja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (5) | merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (6) | mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Pembinaan Kemitraan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaku Usaha Sektor Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Merumuskan konsep kerjasama | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3) | Pembentukan dan Pembinaan areal model | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pembentukan areal model | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | mempresentasikan hasil areal model | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | F. | Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Sistem informasi manajemen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a. | menyusun rancangan sistem data-base | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | mengembangkan sistem informasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a. | Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | G. | Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Melakukan koordinasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Memberikan konsultasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3) | Menjadi saksi ahli | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H. | Sosialisasi/diseminasi Kebijakan/Program | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1) | Menyusun bahan informasi teknis | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | a. | membuat leaflet | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | b. | membuat poster/banner/baliho | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | c. | membuat buletin | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | d. | membuat naskah siaran media cetak dan elektronik | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | e. | melakukan pameran/display | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | f. | membuat papan informasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | g. | membuat buklet | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | h. | membuat audio visual | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | i. | membuat sinopsis | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | j. | membuat slide | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2) | Sosialisasi/diseminasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | melaksanakan pameran | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4. | PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | A. | Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian | | | | | | | | | |
| | | Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai ketua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|----------------------|------|-------------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | TIM PENILAI | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | B. | Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | 1) Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan | | | | | |
| | | 2) Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan | | | | | |
| | C. | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | |
| | | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | |
| | D. | Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | |
| | | 1) Studi banding | | | | | |
| | | 2) Kunjungan kerja | | | | | |
| | | 3) Magang | | | | | |
| | E. | Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian | | | | | |
| | | Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai ketua | | | | | |
| | 5. | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | |
| | A. | Memantau | | | | | |
| | | Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi, sebagai ketua | | | | | |
| | B. | Evaluasi | | | | | |
| | | Melakukan evaluasi, sebagai ketua | | | | | |
| | 6. | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | |
| | A. | Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan | | | | | |
| | | 1) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | |
| | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | |
| | | 2) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku | | | | | |
| | | b. dalam bentuk makalah | | | | | |
| | | 3) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | |
| | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | |
| | | 4) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku | | | | | |
| | | b. dalam bentuk makalah | | | | | |
| | | 5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | |
| | B. | Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan | | | | | |
| | | 1) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | |
| | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | | | | | |
| | | 2) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : | | | | | |
| | | a. dalam bentuk buku | | | | | |
| | | b. dalam bentuk makalah | | | | | |
| | | 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | C. | Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6 | | | | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | |
| | PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN | | | | | | | | |
| | A. | Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | B. | Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan | | | | | | | |
| | | Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : | | | | | | | |
| | | 1. | pemrasaran | | | | | | |
| | | 2. | moderator / pembahas / narasumber | | | | | | |
| | | 3. | peserta | | | | | | |
| | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | | |
| | | Menjadi anggota organisasi profesi di : | | | | | | | |
| | | 1. | Tingkat nasional/ internasional, sebagai : | | | | | | |
| | | a. | Pengurus aktif | | | | | | |
| | | | Anggota aktif | | | | | | |
| | | 2. | Tingkat propinsi, sebagai : | | | | | | |
| | | a. | Pengurus aktif | | | | | | |
| | Anggota aktif | | | | | | | | |
| | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | | Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan | | | | | | | |
| | E. | Perolehan piagam kehormatan | | | | | | | |
| | | | 1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : | | | | | | |
| | | | a. | 30 (tiga puluh) tahun | | | | | |
| | | | | 20 (dua puluh) tahun | | | | | |
| | | | | 10 (sepuluh) tahun | | | | | |
| | | 2. | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| | | 3. | Memperoleh gelar kehormatan lainnya | | | | | | |
| | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | | |
| | | | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas | | | | | | |
| | | | 1. | Sarjana/ D IV | | | | | |
| | | | 2. | Pasca Sarjana | | | | | |
| | | | 3. | Doktor | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| III | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| | <div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>NIP.</div> |
| IV | Catatan Pejabat Pengusul : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP.</div> |
| V | Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>.....,.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP.</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP.</div> |
| VI | Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| | <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div> | <div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP.</div> |

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengendali Ekosistem Hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENYIAPAN PENGENDALIAN
EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyiapan pengendalian ekosistem hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN
EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan pengendalian ekosistem hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengendali Ekosistem Hutan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi: Masa Penilaian:

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BKN Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
b.;**)

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan jenjang ke dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA

:

..... **)

KETIGA

:

..... **)

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di

pada tanggal

NIP. _____

TEMBUSAN:

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN
Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
- sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- Tembusan:
- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
 - 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal; b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012; 5. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Menetapkan :
PERTAMA : MEMUTUSKAN:
: Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

KEDUA : **)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Menteri Kehutanan;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
 - 3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 - 4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Menteri Kehutanan;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/ golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan :
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.